

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MANAGEMEN PERMODALAN KOPERASI BERBASIS SYARIAH DI DESA CEGUK

Dosen STAIN Pamekasan Sri Handayani/ andayani154@gmail.com
Dosen STAIN Pamekasan Ainur Rahman Hidayat anik_mamang@yahoo.com

Abstrak:

Penelitian ini adalah kajian ekonomi dalam arti sempit khususnya tentang Koperasi Syariah sebagai proses pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pemetaan potensi lokal di desa Ceguk Pamekasan sebagai modal dasar pembentukan koperasi syariah? *Kedua*, bagaimana meningkatkan mutu *skill* pengelola koperasi syariah dalam pemenuhan kebutuhan anggota? *Ketiga*, bagaimana membuat jaringan sosial dalam meningkatkan kemajuan koperasi syariah sehingga mandiri? *Keempat*, bagaimana mengelola, menguatkan, dan mengembangkan koperasi syariah dalam meningkatkan aspek manajerialnya? Teknik analisis data diperoleh melalui empat (4) tahap kegiatan pokok, yaitu *pertama*, pemetaan potensi lokal. *Kedua*, peningkatan *skill* pengelola koperasi syariah. *Ketiga*, penguatan jaringan sosial antara pihak pengelola koperasi syariah dan *stakeholders*. *Keempat*, aplikasi aspek manajerial administrasi, proses pendampingan, dan terumuskannya AD/ART koperasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa *pertama*, Ketua KJKS Al Ijtihad mengatakan, bahwa masyarakat tidak pernah bisa melunasi hutangnya, sehingga memunculkan ketergantungan petani pada para tengkulak. Kultur kewirausahaan para petani juga masih sangat sederhana yang ditandai dengan model manajemen keluarga yang berorientasi sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memikirkan simpanan (*saving*) dalam menghadapi musim paceklik. *Kedua*, Peneliti juga melakukan pendampingan pada kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual. Hasil audit pada akun yang ada di laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi ternyata biaya pengeluaran di *software*

per bulan mei 2015 sebesar Rp 20.000,- padahal setelah dilakukan kroscek jumlah pengeluaran sebesar Rp 36.000,-. Perbedaan tersebut menjadikan hasil laporan keuangan tidak akurat. Ketidakakuratan tersebut membuat laporan keuangan tidak bisa dijadikan sebagai alat pengendali dan perencana untuk pihak koperasi sendiri atau investor yang ingin memasukkan dananya. *Ketiga*, penguatan jaringan sosial antara pihak pengelola koperasi syariah dengan *stakeholders*, terutama dengan Dinas Koperasi dan UMKM melalui proses FGD. Kerjasama tersebut dibangun atas dasar kepercayaan yang mengakar kuat di masyarakat. *keempat*, Pengelolaan, penguatan, dan pengembangan KJKS Al Ijtihad terfokus pada aplikasi aspek manajerial administrasi, proses pendampingan, praktek pasca pelatihan, dan terumuskannya AD/ART dengan *monitoring* dan evaluasi.

Kata Kunci:

Pemberdayaan, KJKS Al Ijtihad, Manajerial

Absract:

This is an economic study specifying in Sharia Cooperation as the process of empowerment to increase the economy of kerakyatan (public based economy). The focuses of study are firstly: how is the mapping of local potencies as the basic capital of the establishment of Sharia cooperation in Ceguk Village? Secondly, how is the acceleration of manager quality skill of the sharia cooperation in fulfilling the members need? Thirdly, how are the social networks created to upgrade the cooperation so that it becomes autonomous. Fourthly, how to manage, strengthen, and develop sharia cooperation in increasing managerial aspects? The data analysis techniques used by this research are: firstly, the mapping of local potencies; secondly, the upgrading of the manager skills; thirdly, strengthening the social networks among the mangers and stakeholders; fourthly, application of administration of managerial aspects, the process of accompaniment, and the formulation of the AD/ART (basic articles of understandings) of sharia cooperation. The results of research indicate that firstly, the chair of KJKS Al Ijtihad stated that the members are unable to settle up the debts however it creates the dependency of farmers to the middlemen. The culture of entrepreneurship of the farmers are remain simple it is characterized with the model of family management that the orientation tends to be more consumptive based rather than saving based

particularly in the period of famine. Secondly, the researchers have accompanied the activity of manual finance note. The outcome of the audit shows that expenses on the basis of software on May 2015 were stated Rp. 20.000. However, it was different after the crosschecked was done, the expense was much greater, it was Rp. 36.000. It resulted inaccurate the finance report. The inaccuracy affected invalidity that the finance report cannot be used as control and planning device for the cooperation or investors for investment; thirdly, the strengthen of social networks among, sharia cooperation, stake holders, Dinas Koperasi (state cooperation service) and UMKM through FGD (Focus Group Discussion). The cooperation among these stakeholders is built on the basis of solid rooted trust in society; fourthly, management, strengthening, and development of KJKS Al Ijtihad have been focused on the application of the administration of managerial aspects, process of accompaniment, post training practice, and the formulation of AD/ART (basic articles of understandings) with monitoring and evaluation.

Key words:

Accompaniment, KJKS Al Ijtihad, managerial

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang menyertakan pengembangan koperasi dapat memenuhi harapan terutama dalam memenuhi tuntutan pemerataan pembangunan, pengurangan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan serta memelihara kesinambungan pembangunan. Jika pengembangan koperasi berhasil maka masalah ekonomi yang terjadi akan berkurang seiring tingkat pengembangan koperasi tersebut. Koperasi sendiri berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sejalan dengan falsafah dan asas ekonomi negara Indonesia.¹

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* bagi semua umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Nilai-nilai ajaran Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pemeluknya akan tetapi memberikan *maslahah* bagi kehidupan seluruh umat manusia terutama di dalam kegiatan ekonomi. Prinsip tolong menolong dan kegiatan yang bersifat kolektif lebih diutamakan di dalam melakukan kegiatan usaha pada perekonomian Islam.

Kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh kepentingan individu dan pertimbangan transaksional dalam setiap kegiatan ekonomi hendaknya dapat

¹Yuyun dalam Soeharsono sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 159.

diperkecil. Islam tidak melarang manusia untuk memiliki dan mengelola sumber kekayaan yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi apabila kita kembali pada prinsip yang paling dasar bahwa segala yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, maka sudah seharusnya manusia sebagai makhluk Allah SWT selalu berpedoman pada nilai dan norma yang telah ditetapkan-Nya. Perekonomian Islam memberikan peluang bagi siapa saja dalam mewujudkan keinginannya karena di dalam sistem perekonomian Islam (syariah) lebih berdasarkan pada prinsip tolong menolong dalam kegiatan ekonomi yang berpegang pada asas rela sama rela, asas manfaat, asas adil, dan saling menguntungkan.

Koperasi adalah bentuk usaha yang berasaskan pada prinsip gotong royong dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan diantara sesama anggotanya. Bentuk usaha koperasi berasaskan kekeluargaan dimana setiap keuntungan akan dibagi bersama oleh para anggotanya dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Di sisi lain, kegiatan usaha pada perekonomian Islam mengutamakan sistem bagi hasil dimana setiap keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Melihat keberadaan dua konsep ini dapat disampaikan bahwa antara ekonomi Islam dan koperasi pada garis besarnya sejalan baik secara prinsip maupun tujuan yang akan dicapai, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera yang dalam hal ini khususnya bagi para pelaku usaha mikro.

Kesamaan prinsip dan tujuan pendirian yang dimiliki koperasi merupakan bentuk usaha yang sangat sesuai untuk diterapkan berdasarkan syariah Islam dalam membantu kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai salah satu model dari lembaga keuangan mikro syariah.

Metode Penelitian

A. Epistemologi

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah riset aksi. Di antara nama-namanya, riset aksi sering dikenal dengan PAR atau *Participatory Action Research*. Adapun pengertian riset aksi menurut Corey (1953) adalah proses di mana kelompok sosial berusaha melakukan studi masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka.

Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (di mana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap

konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain-lain yang terkait. Yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan.²

PAR terdiri dari tiga kata yang selalu berhubungan seperti daur (siklus), yaitu partisipasi, riset, dan aksi. Artinya hasil riset yang telah dilakukan secara partisipatif kemudian diimplementasikan ke dalam aksi. Aksi yang didasarkan pada riset partisipatif yang benar akan menjadi tepat sasaran. Sebaliknya, aksi yang tidak memiliki dasar permasalahan dan kondisi subyek penelitian yang sebenarnya akan menjadi kontraproduktif. Namun, setelah aksi bukan berarti lepas tangan begitu saja, melainkan dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi yang kemudian menjadi bahan untuk riset kondisi subyek penelitian setelah aksi. Begitu seterusnya hingga kemudian menjadi sesuatu yang ajeg. Oleh Stephen Kemmis proses riset aksi digambarkan dalam model cyclical seperti spiral. Setiap *cycle* memiliki empat tahap, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi.

B. Prinsip-prinsip PAR

Menurut Winter (1989) dalam riset aksi terdapat enam prinsip yang dijadikan petunjuk melakukan riset. Enam prinsip tersebut adalah :

1) Refleksi kritis

Kebenaran dalam lingkungan sosial sangat relatif dan tergantung pada subyek penelitian. Pertimbangan situasi yang tercantum dalam catatan-catatan lapangan, dokumen resmi harus telah mendapat pengakuan secara implisit dari subyek. Maka, barulah bisa dikatakan bahwa fakta tersebut benar apa adanya. Prinsip refleksi kritis menjamin orang-orang untuk mempertimbangkan isu-isu, proses-proses, dan membuat interpretasi, asumsi, dan penilaian secara eksplisit. Dengan cara ini pertimbangan praktis bisa menyempurnakan pandangan-pandangan teoritis.

2) Dialektika kritis

Realitas sosial yang partikular bisa menjadi valid secara konsensual, yang mana bahasa menjadi sarana penyampaian. Fenomena pada umumnya dikonseptualisasikan melalui dialog. Maka dari itu, prinsip dialektika kritis menghendaki pemahaman pengaturan hubungan antara fenomena dan konteksnya, dan antara elemen-elemen

²LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, Modul Pelatihan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif IAIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya : LPM IAIN Sunan Ampel, 2008), hlm. 27.

yang menyusun fenomena. Elemen kunci adalah mereka yang bertentangan dengan yang lainnya, dan itu merupakan salah satu yang hampir suka menciptakan perubahan.

3) Kolaborasi sumber daya

Partisipan dalam proyek riset aksi adalah peneliti juga. Prinsip kolaborasi sumber daya ini berpraduga bahwa ide tiap orang sama signifikannya sebagai potensi sumber daya untuk membuat interpretasi, kategori analisis yang dinegosiasikan di antara partisipan. Hal ini ditujukan untuk menghindari kemiringan kredibilitas dari pemegang ide terdahulu. Selain itu, secara khusus hal tersebut dapat menimbulkan kesadaran dan toleransi dari adanya kontradiksi antara banyak sudut pandang dan di dalam satu sudut pandang pun.

4) Kesadaran resiko

Proses perubahan berpotensi mengancam semua cara yang telah berlaku sebelumnya, dan itu menciptakan ketakutan secara psikis di antara para praktisinya. Salah satu ketakutan yang utama adalah datang dari ego yang menahan diri dari diskusi terbuka terhadap interpretasi, ide, dan penilaian orang lain. Seorang inisiator riset aksi akan menggunakan prinsip ini untuk menenangkan ketakutan-ketakutan lain dan mengundang partisipasi dengan menegaskan bahwa masyarakat juga akan menjadi subyek dari proses yang sama, dan bagaimana pun juga hasil akhirnya adalah belajar bersama.

5) Struktur plural

Alam penelitian pada umumnya terdiri dari berbagai macam pandangan, komentar, dan kritik, dalam rangka menuju berbagai kemungkinan aksi dan interpretasi. Pendalaman struktur yang plural ini menghendaki banyak teks untuk pelaporannya. Hal ini berarti akan banyak pertimbangan secara eksplisit dengan komentar yang kontradiktif dan berbagai macam panduan untuk aksi. Laporan pada dasarnya adalah sebuah tindakan sebagai dukungan untuk meneruskan diskusi di antara kolaborator daripada memutuskan sebuah konklusi akhir dari sebuah fakta.

6) Teori, praktek, dan transformasi

Bagi para praktisi riset aksi, teori menginformasikan praktek, dan praktek menyempurnakan teori menuju upaya transformasi yang terus-menerus. Dalam lingkungan apa pun, aksi tiap orang didasarkan pada asumsi, teori, dan hipotesis yang secara implisit dipegang teguh, dan

dengan tiap hasil observasi pengetahuan teoritik akan bertambah. Selain prinsip-prinsip di atas, PAR mengharuskan adanya pemihakan baik bersifat epistemologis, ideologis, maupun teologis dalam rangka melakukan perubahan yang signifikan. Pemihakan epistemologis mendorong peneliti untuk menyadari bahwa banyak cara untuk melihat masyarakat.

Pemihakan ideologis mengharuskan peneliti memiliki empati dan kepedulian tinggi terhadap semua individu dan kelompok masyarakat yang lemah, tertindas, terbelenggu, dan terdominasi. Pemihakan teologis menyadarkan peneliti bahwa teks-teks agama yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits memberikan dorongan yang besar dengan imbalan pahala yang besar pula kepada semua orang beriman yang melakukan upaya-upaya pertolongan dan pemberdayaan terhadap individu maupun kelompok masyarakat *dhul'afa*, *mustadh'afin*, dan *mazlumin*.³

C. Strategi PAR

Peneliti sebagai fasilitator masyarakat pada dasarnya berperan dalam pengembangan pembelajaran masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi politik yang berlangsung secara mapan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog sehingga memiliki bargaining position yang kuat dengan kekuatan lain. Maka dari itu diperlukan strategi-strategi sebagai berikut :⁴

- 1) Memulai dengan tindakan mikro yang memiliki konteks makro/global.
- 2) Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis masyarakat.
- 3) Membangun kembali kelembagaan masyarakat.
- 4) Pengembangan kesadaran masyarakat melalui pendidikan yang transformatif.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan penguasaan dan pengelolaan serta kontrol terhadap sumber daya alam dan manusia (terutama sumber daya ekonomi).
- 6) Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah).

³Ibid, hal. 30-31.

⁴ Ahmad Mahmudi, SH., Kuliah Pengantar Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 10.

- 7) Mengembangkan pendekatan kewilayahan/kawasan yang lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki.
- 8) Membangun jaringan ekonomi strategis yang berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi, dan permodalan.

D. Langkah-langkah Proses Pemecahan Masalah

1. Riset Pendahuluan

Sebelum upaya *get in* dalam kawasan desa Ceguk, peneliti akan melakukan riset pendahuluan sebagai penjajakan awal. Dalam riset ini peneliti akan mengobservasi aktivitas pengurus dan anggota koperasi syariah KJKS BMT AL-IJTIHAD dan yang terpenting adalah upaya mengendus masalah. Riset ini berguna sebagai pijakan untuk masuk pada analisis lebih jauh. Riset ini juga akan mempermudah peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu inkulturasi.

2. Inkulturasi

Langkah selanjutnya adalah inkulturasi atau melebur dan membaur dalam aktivitas pengurus dan anggota koperasi syariah KJKS BMT AL-IJTIHAD. Informasi awal yang telah didapat ketika melakukan riset pendahuluan dapat dijadikan pedoman untuk mengadaptasikan diri dalam tugas pengurus dan anggota koperasi syariah KJKS BMT AL-IJTIHAD. Peneliti juga akan melakukan proses pendekatan sebagai upaya *trust building*. Pendekatan yang akan peneliti lakukan adalah dengan memberikan bimbingan dan *share* pengalaman dan teoritis, baik pada pengurus maupun anggota koperasi syariah KJKS BMT AL-IJTIHAD secara berkelanjutan.

3. Pengorganisasian Masyarakat untuk Agenda Riset

a. Membentuk Kelompok

Peneliti akan membangun kelompok dari level *grass root* (yaitu anggota koperasi) sampai pada level pengurus setelah tahap inkulturasi dilalui. Kelompok yang baik di sini bukan berarti yang memiliki banyak anggota tetapi lebih mementingkan keterwakilan kepentingan dan pengetahuan. Lima orang sudah dianggap cukup asalkan benar-benar mewakili dan aktif. Tujuan membangun kelompok ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bersamaan dengan upaya memperkuat ketahanan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab terhadap kemajuan koperasi ke depan.

b. Melakukan Analisis Masalah

Dalam pertemuan kelompok akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu diskusi mengenai permasalahan tertentu sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam FGD inilah pendidikan populer dilancarkan. Para partisipan diajak untuk mengkaji permasalahannya, mencari penyebab, dan melihat dampak negatifnya. Pelaksanaan teknik-teknik PRA, seperti *daily routines*, kalender musim, analisis kelembagaan, dan lainnya juga berupa diskusi. Dialog interaktif yang terbangun diharapkan dapat membuka wawasan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya.

c. Merumuskan Masalah

Masyarakat merumuskan masalah mendasar khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup sebagai anggota. Teknik yang mudah untuk merumuskan masalah ini biasanya dengan analisis pohon masalah (hirarkhi masalah), yang selanjutnya dibuat analisa pohon tujuan. Selanjutnya dilengkapi dengan teknik *matrik ranking* sebagai langkah untuk memilih prioritas persoalan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu.

4. Perencanaan Tindakan Aksi untuk Perubahan Sosial

a. Mengorganisir Gagasan

Hasil-hasil FGD khususnya dalam pelaksanaan teknik-teknik PRA akan dianalisis sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pemecahan masalah. Setelah *matrik ranking* masalah ditetapkan bersama, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan bersama sebuah upaya pemecahan masalah. Ide dan gagasan dari partisipan dalam tahap perencanaan ini diinventarisir terlebih dahulu, kemudian diputuskan bersama-sama gagasan yang dipilih.

b. Mengorganisir Sumber Daya (Potensi)

Gagasan pemecahan masalah yang telah ditetapkan harus mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki anggota, baik sebagai bagian dari koperasi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Komunitas yang dibentuk harus sudah menginventarisir siapa yang memiliki potensi dan sumber dayanya berupa apa. Begitu seterusnya hingga keragaman sumber daya yang dimiliki masyarakat (anggota) dapat saling melengkapi guna mendukung jalannya aksi perubahan sosial. Semua yang dilakukan terhadap anggota juga akan dilakukan terhadap pengurus.

c. Menyusun Strategi Gerakan

Komunitas menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem yang telah dirumuskan. Komunitas menentukan langkah-langkah

sistematik, menentukan pihak yang terlibat (*stakeholders*), merumuskan kemungkinan keberhasilan, kegagalan program yang direncanakan, dan mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang menghalangi keberhasilan program. Penyusunan strategi gerakan ini merupakan langkah penting untuk pemecahan masalah. langkah mudah untuk menyusun strategi ini adalah dengan teknik mengelola program yang berbentuk *Logical Framework Approach* (LFA).

5. Aksi

Hasil perencanaan aksi selanjutnya diimplementasikan secara simultan dan partisipatif. Pemecahan persoalan bukanlah sekedar untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri, tetapi merupakan proses pembelajaran masyarakat (anggota) dan pengurus, sehingga terbangun pranata baru dalam komunitas dan sekaligus memunculkan *community organizer* (pengorganisir dari anggota dan pengurus sendiri). Hal itu semua pada akhirnya akan muncul *local leader* (pemimpin lokal) yang menjadi pelaku dan pemimpin perubahan.

6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan mengkroscek apakah yang telah dilaksanakan tetap berada dalam jalur yang ditentukan, bagaimana impresi, dan efek yang dihasilkan. Semua kegiatan aksi jika ternyata membawa implikasi negatif dan destruktif, maka bukan tidak mungkin peneliti harus merubah arah kebijakan, karena sebenarnya PAR menghendaki pendekatan yang fleksibel dan multidimensional untuk menunjang progresifitas anggota dan pengurus.

7. Refleksi

Informasi yang telah terkumpul ditinjau secara terus-menerus, kemudian diklasifikasi, diverifikasi, disistematisasikan, dan terakhir diambil kesimpulan-kesimpulannya. Data-data lengkap yang telah tersusun, dengan demikian menjadi bermakna. Hal berikutnya adalah berdasarkan hasil riset, proses pembelajaran anggota dan pengurus, dan program-program aksi yang sudah terlaksana, peneliti bersama anggota dan pengurus merefleksikan semua proses dan hasil yang diperolehnya (dari awal sampai akhir). Refleksi teoritis dirumuskan secara bersama, sehingga menjadi sebuah teori akademik yang dapat dipresentasikan pada khayalak publik sebagai pertanggungjawaban akademik.

E. Triangulasi

Semua data yang diperoleh tidak bisa langsung dipercaya validitasnya. Kebenaran data bisa dengan menggunakan prinsip triangulasi informasi, yaitu pemeriksaan dan periksa ulang melalui :⁵

1. Keragaman Teknik PRA

Setiap teknik PRA mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semua informasi yang dikumpulkan dan dikaji dalam satu teknik PRA tentu tidak dapat dipercaya begitu saja. Teknik-teknik PRA pada umumnya adalah saling melengkapi dan digunakan sesuai dengan proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang dibutuhkan.

2. Keragaman Sumber Informasi

Anggota dan pengurus selalu memiliki bentuk hubungan yang kompleks dan memiliki berbagai kepentingan yang sering berbeda bahkan bertentangan. Informasi yang berasal dari sumber tunggal atau terbatas tidak jarang diwarnai oleh kepentingan pribadi. Informasi dari sumber yang berbeda sangat perlu dikaji ulang dan silang. Penggunaan teknik PRA perlu dipastikan, bahwa tidak didominasi oleh beberapa orang atau elit saja, tetapi tetap melibatkan semua pihak, termasuk yang termiskin dan perempuan. Sumber informasi lain juga dapat dimanfaatkan seperti sumber sekunder yang berada di desa.

F. Teoritisasi

Landasan dalam cara kerja PAR terutama adalah gagasan-gagasan yang datang dari rakyat. Fasilitator PAR oleh karena itu harus melakukan langkah-langkah berikut :⁶

1. Memperhatikan secara sungguh-sungguh gagasan yang datang dari rakyat yang masih terpenggal dan belum sistematis;
2. Mempelajari gagasan tersebut secara bersama-sama dengan mereka, sehingga menjadi gagasan yang sistematis;
3. Menyatu dengan rakyat;
4. Mengkaji kembali gagasan yang datang dari mereka, sehingga sadar dan memahami bahwa gagasan itu milik mereka sendiri;
5. Menerjemahkan gagasan tersebut dalam bentuk aksi;
6. Menguji kebenaran gagasan melalui aksi;

⁵SUSDEC, Belajar Bersama Masyarakat, hlm. 36.

⁶LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, Modul, hlm 36.

7. Dan seterusnya secara berulang-ulang sehingga gagasan tersebut menjadi lebih benar, lebih penting dan lebih bernilai sepanjang masa.

Semua proses tersebut akan memunculkan suatu pengetahuan rakyat dan itulah teori baru dalam pengetahuan *genuin* masyarakat.

Pendekatan penelitian yang dipakai dengan demikian adalah riset aksi. Riset aksi sering dikenal dengan PAR atau *Participatory Action Research*. Pengertian riset aksi adalah proses dimana kelompok sosial berusaha melakukan studi masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka⁷

PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain-lain yang terkait. Hal yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan⁸

Peneliti sebagai fasilitator masyarakat pada dasarnya berperan dalam pengembangan pembelajaran masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi politik yang berlangsung secara mapan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog sehingga memiliki *bargaining position* yang kuat dengan kekuatan lain. Maka dari itu diperlukan suatu strategi tersendiri⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan pemetaan kebutuhan dengan silaturahmi, wawancara, FGD (*focus group discussion*) bersama masyarakat di desa Ceguk.

Obyek penelitian yang akan diteliti adalah komunitas masyarakat di desa Ceguk yang berkeinginan kuat untuk membentuk dan mengembangkan koperasi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, *interview*, observasi, dan FGD (*focus group discussion*) bersama berbagai komunitas masyarakat di desa Ceguk Pamekasan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam membuat rumusan jawaban dalam penelitian

⁷Ibid., hlm. 27

⁸Ibid

⁹Ibid

nantinya. Data primer diperoleh melalui *interview*, observasi, dan FGD (*focus group discussion*) bersama berbagai komunitas masyarakat desa Ceguk Pamekasan. Sementara data sekunder didapatkan dari berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan proses pembentukan dan pengembangan koperasi syariah di desa Ceguk pamekasan.

Teknik analisis data dilakukan melalui rencana kegiatan dalam empat (4) tahap, antara lain:

- Tahap I : Rencana program adalah pemetaan potensi lokal yang di *foollow up* dengan diskusi hasil Tim dengan Tim Ahli, Lokakarya penguatan potensi lokal, merumuskan strategi atau kebijakan pengembangan koperasi syariah. Hasil rumusan ini disosialisasikan kepada *stakeholder* dan tahap berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan berupa pelatihan yang terfokus kepada peningkatan mutu tenaga teknis, administrasi, dan pengelola koperasi syariah.
- Tahap II : Program terfokus kepada peningkatan mutu (*skill*) pengelola koperasi syariah. Beberapa program yang direncanakan adalah Kursus; pelatihan pengoperasian komputer program excel, pelatihan neraca keuangan, diklat pengembangan usaha koperasi, dan program lainnya sesuai dengan kebutuhan koperasi syariah.
- Tahap III : Program terfokus kepada upaya penguatan jaringan sosial antara pihak pengelola koperasi syariah, dan *stakeholders* khususnya dengan kalangan dunia usaha demi kelangsungan dan kemajuan koperasi syariah, sehingga ke depan lebih mandiri. Rencana program adalah relasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, pengenalan program (sosialisasi), terbentuknya FGD dan sebagainya.
- Tahap IV : Terfokus kepada aplikasi aspek manajerial administrasi dan proses pendampingan koperasi syariah, praktek pasca pelatihan/kursus bagi pengelola koperasi, dan terumuskannya AD/ART koperasi syariah dengan monitoring dan evaluasi. Rencana programnya adalah pendampingan dan monitoring serta evaluasi secara terus menerus sehingga setiap hasil atau temuan dalam aplikasi program dapat dijadikan *progress report* untuk menentukan program berikutnya.

Setiap tahap program, sebagai bentuk akuntabilitas program akan dilakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring secara komprehensif dan merumuskan perencanaan program tahun berikutnya antara Tim dengan *stakeholders*. Evaluasi dan Refleksi adalah kegiatan penilaian terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi dampak kegiatan yang sudah dilaksanakan bersama masyarakat, serta keberlanjutan program bagi pengurus koperasi syariah.

Indikator Keluaran adalah sebagai berikut:

- a. Keluaran (Kualitatif)
 - 1) Meningkatnya pemahaman, penalaran, kepekaan dan implementasi partisipatif dalam pembentukan koperasi syariah bagi masyarakat desa Ponteh;
 - 2) Berkembangnya potensi masyarakat desa Ponteh terutama dalam pembentukan koperasi syariah secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif;
 - 3) Bertambahnya pengalaman belajar dan bekerja secara langsung dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya secara kolektif.
- b. Keluaran (Kuantitatif)
 - 1) Terbentuknya koperasi syariah di desa Ponteh kabupaten Pamekasan
 - 2) Terelesaiannya laporan pembentukan koperasi syariah di desa Ponteh kabupaten Pamekasan
- c. Pencapaian Keluaran

Kegiatan pembentukan koperasi syariah meliputi: Persiapan berupa kegiatan *need assessment* untuk mempersiapkan proses pendampingan. Pelaksanaan pendampingan untuk mempersiapkan proses terciptanya pembentukan koperasi syariah dan penguatannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan penelitian tentang potensi lokal di desa Ceguk Pamekasan sebagai modal dasar pembentukan koperasi syariah, yaitu:

- a. Masyarakat desa Ceguk lahan pertaniannya sangat tergantung pada musim penghujan terutama warga di dusun Dulang dan Barat
- b. Kekurangan air di musim kemarau mengharuskan masyarakat desa Ceguk berpikir kreatif. Salah satunya dengan beternak ayam arab dan kambing etawa di saat musim kemarau tiba
- c. KJKS BMT Al Ijtihad lahir sesungguhnya dalam rangka membantu warga masyarakat desa Ceguk dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Temuan penelitian tentang peningkatan mutu *skill* pengelola koperasi syariah dalam pemenuhan kebutuhan anggota, yaitu:

- a. Mutu *skill* pengelola koperasi berkaitan dengan organisasi, administrasi, usaha, dan keuangan
- b. Operasional kegiatan koperasi dilakukan oleh seluruh pengurus untuk kegiatan pemasaran, tetapi untuk kegiatan pencatatan keuangan hanya dilakukan oleh bendahara
- c. Hasil pengamatan terhadap setiap akun yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi berupa hasil audit *intern*, berupa kas maupun piutang termasuk audit pada pendapatan dan pengeluaran. Pada akun pengeluaran terdapat selisih antara hasil laporan dari software dengan catatan manual bendahara

Temuan penelitian tentang jejaring sosial dalam meningkatkan kemajuan KJKS Al Ijtihad yang mandiri, yaitu:

- a. KJKS BMT Al Ijtihad saat ini masih mengembangkan dua usaha sebagai rintisan usaha-usaha yang lain
- b. Pelayanan dua jasa yang baru dirintis tersebut masih sangat minim kontribusinya terhadap koperasi. Dua usaha yang dimaksud, yaitu layanan jasa fotocopy dan layanan jasa penjualan pulsa elektrik.

Temuan penelitian tentang pengelolaan, penguatan, dan pengembangan KJKS Al Ijtihad dalam meningkatkan aspek manajerialnya. Aspek manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Struktur organisasi KJKS BMT Al Ijtihad sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing secara optimal
- b. AD/ART KJKS BMT Al Ijtihad sebagai hal yang semestinya ada dalam suatu koperasi. AD/ART pun diperlukan sebagai syarat pengurusan legalisasi koperasi ke Notaris
- c. Akte Notaris sebagai syarat formal legalistik yang menyertai lahir dan berkembangnya KJKS BMT Al Ijtihad di masa depan.

1. Kreativitas ekonomi warga desa Ceguk sebagai modal dasar pembentukan KJKS BMT Al Ijtihad

Rencana program diawali dengan pemetaan potensi lokal yang kemudian di tindak lanjuti dengan diskusi hasil Tim bersama Tim Ahli. Lokakarya penguatan potensi lokal dengan merumuskan strategi atau kebijakan pengembangan koperasi syariah sebagai basis ekonomi kerakyatan. Hasil perumusan tersebut disosialisasikan pada *stakeholder* dan tahap berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan berupa pelatihan yang

terfokus kepada peningkatan mutu tenaga teknis, administrasi, dan pengelola KJKS Al Ijtihad.

Akar kemiskinan masyarakat memang sangat kompleks mulai keterbatasan akses permodalan, kultur kewirausahaan yang tidak kondusif, dan ketergantungan pada musim dan cuaca¹⁰

Hal itu membawa konsekuensi pada kebutuhan permodalan yang lantas dilayani oleh para tengkulak, yang kenyataannya tidak banyak menolong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, malah cenderung menjeratnya dalam lilitan utang. Hasil wawancara dengan ketua KJKS Al Ijtihad yang tidak pernah bisa dilunasi yang memunculkan ketergantungan petani pada para tengkulak¹¹

Kultur kewirausahaan para petani juga masih sangat sederhana yang ditandai dengan model manajemen keluarga yang berorientasi sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memikirkan simpanan (*saving*) dalam menghadapi musim paceklik¹²

Potensi dan kearifan lokal adalah beberapa bagian dari *capital* yang dimiliki oleh masyarakat. Program pemberdayaan tidak akan berhasil jika tidak berdasar pada nilai-nilai lokal yang telah mengakar di masyarakat. Masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan merasakan kemajuan, dan akan mampu secara efektif dan efisien memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat¹³

Kearifan lokal adalah modal sosial yang ada di masyarakat. Modal sosial dalam suatu masyarakat bisa menjadi perekat antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Hal itu sesuai dengan pendapat Isbandi Rukminto Adi (2007:58) yang berpendapat, bahwa modal sosial adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada didalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Norma dan aturan yang ada juga mengatur perilaku individu,

¹⁰Arif, *Desentralisasi Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Potensi dan Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Teraju, 2005), hlm. 4

¹¹Ibid

¹²Ibid., hlm. 5

¹³Francis Fukuyama, dalam Jousairi Hasbullah, *Potensi dan Kearifan Lokal dalam Muatan Nilai-Nilai Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 8

baik dalam perilaku kedalam (internal kelompok) maupun perilaku keluar (eksternal, hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain)¹⁴

2. Peningkatkan mutu *skill* pengelola KJKS BMT Al Ijtihad melalui organisasi, administrasi, usaha, dan keuangan

Program terfokus pada peningkatan mutu *skill* pengelola KJKS Al Ijtihad. Beberapa program yang direncanakan adalah kursus, pelatihan neraca keuangan, diklat pengembangan usaha koperasi, dan program lainnya sesuai dengan kebutuhan koperasi syariah.

Sarana yang efektif untuk memfasilitasi atau sebagai instrumen pengorganisasian masyarakat itu adalah dengan membentuk kelembagaan sosial ekonomi yang relevan dengan konteks kebutuhan pembangunan lokal yang bentuknya beragam, seperti forum, paguyuban, atau koperasi.

Peneliti dalam kegiatan ini melakukan pendampingan pada kegiatan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan yang terjadi di KJKS Al Ijtihad dilakukan dengan program dan pencatatan secara manual. Bendahara masih tetap mencatat secara manual dengan maksud untuk membantu dalam mengecek data yang ada di program.

Hasil audit pada akun yang ada dilaporan keuangan khususnya laporan laba/rugi ternyata biaya pengeluaran di *software* per bulan mei 2015 sebesar Rp 20.000,- padahal setelah dilakukan kroscek jumlah pengeluaran sebesar Rp 36.000,-. Perbedaan tersebut menjadikan hasil laporan keuangan tidak akurat. Ketidak akuratan tersebut membuat laporan keuangan tidak bisa dijadikan sebagai alat pengendali dan perencanaan untuk pihak koperasi sendiri atau investor yang ingin memasukkan dananya.

Hasil Audit pada bagian administrasi dilakukan untuk pengendalian *intern* pada kas sebagai berikut:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran kas telah dibuatkan bukti kas masuk dan kas keluar yang telah disetujui oleh yang berwenang di KJKS Al Ijtihad. Skill pengelolaan dalam penerimaan dan pengeluaran kas dari pengurus dan karyawan KJKS Al Ijtihad telah bagus, karena telah membuat bukti kas masuk dan keluar yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Persetujuan tersebut menjadi pengendali dalam akun kas mengingat kas merupakan aktiva yang paling *likuid*

¹⁴Isbandi Rukminto Adi, *Kearifan lokal sebagai Modal Sosial*(Yogyakarta: Radja Pustaka, 2007), hlm.58

- 2) Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas telah diberi nomor urut. Pihak KJKS Al Ijtihad telah melaksanakan pembukuan dengan sistematis, sehingga apabila pencarian akun dapat dilakukan dengan mudah
- 3) Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas telah ditanda tangani oleh yang menerima uang. Hal itu bagian dari *skill* pengurus yang selalu ada bukti setiap terjadi transaksi, sehingga dipastikan bahwa pengurus atau karyawan mengerti terhadap konsekuensi pengeluaran dan penerimaan kas
- 4) Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang kas yang dibatalkan telah diberi tanda sedemikian rupa, sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Perlakuan terhadap bukti yang dibatalkan menunjukkan bahwa telah terjadi konsistensi terhadap setiap bukti yang keluar. Hal ini disebabkan adanya nomer bukti urut yang dibuat. Bukti urut tersebut menyebabkan pengurus atau karyawan tidak bisa berbuat curang terhadap bukti. Kecurangan dapat terdeteksi dari nomer urut bukti yang dibatalkan sehingga seakan-akan menjadi saksi dalam pencatatan keuangan
- 5) Penerimaan dan pengeluaran kas telah dibukukan dengan segera. Pencatatan yang segera dilakukan membuat pihak KJKS Al Ijtihad terhindar dari kesalahan dalam pencatatan. Satu transaksi saja tidak dicatat menyebabkan laporan keuangan akan salah dan ada aktiva yang hilang
- 6) Pemisahan tugas antara yang menerima kas dan mengeluarkan kas (kasir) dengan petugas yang menyelenggarakan pembukuan belum dilakukan. Hal itu terjadi karena pencatatan dilakukan dengan mencocokkan buku catatan manual dengan nilai kas yang ada di data *software* mengenai kesesuaiannya atau tidak. Pengurus atau petugas akan mengkoscek letak perbedaan tersebut jika tidak sesuai. Pemisahan tugas yang belum dilakukan menyebabkan adanya kemungkinan suatu saat terjadi kecurangan pada salah satu pengurus yang tidak jujur. Hal lain juga mengantisipasi terjadinya *input double* atau lupa di *input*
- 7) Pengecekan dilakukan secara berkala oleh pihak pejabat dalam hal ini pengawas, yaitu diperiksa oleh bapak Matnin setiap akhir periode, seperti yang dijelaskan ketua KJKS Anis Sumadi dan Susmiati sebagai bendahara¹⁵ Pelaksanaan kegiatan ini bagus sekali karena memang harus

¹⁵Hasil Wawancara dengan ketua KJKS Anis Sumadi dan Susmiati sebagai bendahara di kantor KJKS Al Ijtihad pada tanggal 6 Juni 2015

dilakukan pemeriksaan berkala untuk menguji kebenaran aktiva yang dimiliki

- 8) Pembatasan sisa kas belum dilakukan secara tertulis hanya berdasar inisiatif kasir dan bendahara, yaitu jika dana tersisa antara 1 juta sampai 3 juta, sehingga tidak boleh memberikan pembiayaan. Pada pelaksanaan ini seyogyanya dilakukan dengan membuat aturan tertulis sehingga tidak terjadi saling melempar masalah antar pengurus atau karyawan jika suatu saat nanti terjadi kesalahan
- 9) Pemeriksaan mendadak belum dilakukan oleh pejabat berwenang, padahal pemeriksaan tersebut penting untuk melihat apakah benar nilai yang dicatat dengan cek fisik berupa nilai kas tunai. Pelaksanaan ini sebaiknya harus sudah dilakukan untuk melihat konsistensi laporan dengan keadaan aktiva koperasi aktual
- 10) Penyimpanan kas sebagian berada di teman yang amanah, dalam hal ini keuangan dibawa oleh sekretaris, karena yang paling dekat dengan kantor KJKS Al Ijtihad. Pelaksanaan seperti itu harus cepat dilakukan dengan proses penyimpanan di bank agar lebih aman
- 11) Pembayaran dengan cheque belum dilakukan karena KJKS Al Ijtihad masih relatif baru
- 12) Rekening koran dari bank dan rekonsiliasi secara berkala masih belum dilakukan karena masih relatif baru.

Pengendalian *intern* atas piutang sebagai berikut:

- 1) Pemisahan antara hasil penagihan dengan bagian pencatatansudah ada. Pencatatan dilakukan oleh pihak bendahara, sedangkan penagihan dilakukan oleh juru tagih, seperti penjelasan ketua KJKS Anis Sumadi¹⁶Pelaksanaan ini sebaiknya diteruskan
- 2) Petugas khusus yang memberi dan menyetujui piutang yang dipisahkan dengan pencatatannya belum ada, karena seluruh pengurus difungsikan sebagai *marketing* dan juruh tagih. Meskipun tidak terbentuk tugas masing-masing tetapi pihak pengurus atau karyawan harus membentuk orang yang harus bertanggungjawab terhadap bidang-bidangnya. Jangan sampai jika terjadi masalah saling lempar
- 3) Pemisahan pemegang buku pembantu piutang dengan buku besar pembantubelum ada Kesemuanya masih masuk ke *software*. Alangkah baiknya koperasi juga mempunyai manualnya agar ketika *software* rusak menjadi alat pembantu.

¹⁶Ibid

- 4) Piutang telah dibuatkan daftar *schedule* yang ada di data *software*, seperti penjelasan Susmiati bendahara KJKS¹⁷
- 5) Penentuan piutang ragu-ragu yang harus disetujui lebih dahulu oleh pengurus belum pernah dilakukan. Suatu saat koperasi sebaiknya melakukan persetujuan terlebih dahulu jika terdapat piutang ragu-ragu.
- 6) Pemberian pinjaman pada yang masih menunggak belum pernah dilakukan. Jika terjadi menunggak suatu saat maka penagihan dilakukan dengan segera jangan ditunda, mengingat manusia bersifat hilaf, seperti yang dijelaskan Anis Sumadi¹⁸
- 7) Setiap anggota yang akan diberikan pinjaman selalu mendapatkan persetujuan dari pengurus, seperti yang dipaparkan oleh Anis Sumadi, Dedy, dan Ifan¹⁹. Pelaksanaan ini sebaiknya tetap dilaksanakan seterusnya. Persetujuan ini penting untuk kelanjutan koperasi ke depan.
- 8) Setiap penjualan dilakukan pencatatan, seperti yang diutarakan oleh Latief²⁰. Pelaksanaan ini seyogyanya dilaksanakan seterusnya
- 9) Penagihan selalu dilakukan jika terjadi tunggakan, seperti yang dijelaskan oleh Anis Sumadi²¹. Karena belum terjadi tunggakan maka untuk kedepan seringkali memberikan pemberitahuan jangka waktu pelunasan piutang kepada nasabah dengan cara yang baik.

3. Jejaring sosial sebagai modal sosial mengembangkan KJKS Al Ijtihad yang mandiri

Program terfokus kepada upaya penguatan jaringan sosial antara pihak pengelola koperasi syariah, dan *stakeholders* khususnya dengan kalangan dunia usaha demi kelangsungan dan kemajuan koperasi syariah, sehingga ke depan lebih mandiri. Rencana program adalah relasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, pengenalan program (sosialisasi), terbentuknya FGD dan sebagainya.

Inti dari konsep modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut

¹⁷Ibid

¹⁸Ibid

¹⁹Hasil Wawancara dengan Anis Sumadi, Dedy, dan Ifandi kantor KJKS Al Ijtihad pada tanggal 13 Juni 2015

²⁰Hasil Wawancara dengan Latief di kantor KJKS Al Ijtihad pada tanggal 13 Juni 2015

²¹Hasil Wawancara dengan Anis Sumadi, Dedy, dan Ifan di kantor KJKS Al Ijtihad pada tanggal 13 Juni 2015

diwarnai suatu pola interaksi yang imbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun atas dasar kepercayaan yang ditopang oleh nilai-nilai sosial yang positif dan mengakar kuat di masyarakat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan, adapun unsur-unsur yang ada dalam modal sosial menurut Francis Fukuyama adalah sebagai berikut : 1) Adanya partisipasi dalam suatu jaringan. ; 2) Reciprocity; 3) Trust (rasa percaya); 4) Norma Sosial ; 5) Nilai-nilai; 6) Tindakan yang proaktif²²

Pendekatan partisipatif merupakan alternatif yang bisa dipakai dalam upaya pengelolaan lingkungan. Pendekatan partisipatif memerlukan perencanaan partisipatoris dalam melakukan perubahan terencana di level komunitas yang sejalan dengan akar berkembangnya kemajuan masyarakat. Salah satu inti utama dari diskursus komunitas ataupun metode intervensi pengembangan masyarakat adalah asumsi, bahwa "masyarakat bukanlah sekumpulan orang bodoh", yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah (instruksi) belaka²³

Suatu komunitas telah mencapainya pada suatu taraf yang sebenarnya setelah melalui suatu proses evolusi yang cukup panjang. Setiap komunitas hampir telah mengembangkan dan mempunyai kearifan lokal (*Local Wisdom*) sejalan dengan upaya mereka mengatasi permasalahan yang ada. Setiap komunitas telah mengembangkan metode adaptasi yang relatif canggih dalam rangka mengelola lingkungannya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai makhluk bodoh²⁴

4. Pengelolaan, penguatan, dan pengembangan KJKS Al Ijtihad dalam meningkatkan aspek manajerialnya

Pengelolaan, penguatan, dan pengembangan KJKS Al Ijtihad terfokus kepada aplikasi aspek manajerial administrasi dan proses pendampingan koperasi syariah, praktek pasca pelatihan/kursus bagi pengelola KJKS Al Ijtihad, dan terumuskannya AD/ART dengan monitoring dan evaluasi. Rencana programnya adalah pendampingan dan monitoring serta evaluasi secara terus menerus sehingga setiap hasil atau temuan dalam aplikasi program dapat dijadikan *progress report* untuk menentukan program berikutnya.

²²Fukuyama, dalam Jousairi Hasbullah, *Potensi*, hlm. 10

²³Adi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik* (Yogyakarta: Radja Pustaka, 2007), hlm.23.

²⁴Ibid., hlm.16

Setiap tahap program sebagai bentuk akuntabilitas program dilakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring secara komprehensif dan merumuskan perencanaan program tahun berikutnya antara Tim dengan *stakeholders*. Evaluasi dan Refleksi adalah kegiatan penilaian terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi dampak kegiatan yang sudah dilaksanakan bersama masyarakat, serta keberlanjutan program bagi pengurus koperasi syariah.

Indikator keluaran yang bersifat kualitatif sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman, penalaran, kepekaan, dan implementasi partisipatif dalam pembentukan KJKS Al Ijtihad bagi masyarakat desa Ceguk
- 2) Berkembangnya potensi masyarakat desa Ceguk terutama dalam pembentukan KJKS Al Ijtihad secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif
- 3) Bertambahnya pengalaman belajar dan bekerja secara langsung dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya secara kolektif.

Indikator keluaran yang bersifat kuantitatif sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya KJKS Al Ijtihad di desa Ceguk kabupaten Pamekasan
- 2) Terselenggaranya laporan pembentukan KJKS Al Ijtihad di desa Ceguk kabupaten Pamekasan

Kegiatan pembentukan KJKS Al Ijtihad meliputi: Persiapan berupa kegiatan *need assessment* untuk mempersiapkan proses pendampingan. Pelaksanaan pendampingan untuk mempersiapkan proses terciptanya pembentukan KJKS Al Ijtihad dan penguatannya.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi adalah belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang benar dalam berkoperasi. Koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

5. Analisis Pengembangan Keilmuan Kreativitas Ekonomi

Pengembangan kreativitas ekonomi di masyarakat ceguk terkesan masih tetap mengikuti pola lama meskipun kecenderungan masyarakat

adalah pekerja keras suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil yang didapat masih tidak sebanding dengan peningkatan taraf hidupnya. Praktek rentenir masih dilakukan mengingat lembaga keuangan tidak masuk ke wilayah masyarakat kecil. Hal ini dapat dilihat masih adanya kesempatan para rentenir untuk melakukan transaksi hutang piutang dengan bunga yang tinggi. Masyarakat masih tetap berhubungan dengan rentenir karena kemudahan yang didapat untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Maka adanya koperasi syariah Ijtihad merupakan salah satu cara memotong mata rantai rentenir yang ada dimasyarakat Ceguk Tlanakan Pamekasan.

Mata rantai tersebut akan dapat putus jika Koperasi Ijtihad dapat menjadi pioner untuk menghapusnya dengan kinerja koperasi saat ini dan kedepan.

6. Analisis Pengembangan Keilmuan Dalam Mutu *Skill* Pengelola Koperasi

Mutu skill pengelola secara garis besarnya sudah mengikuti aturan perkoperasian. Aturan perkoperasian dapat dilihat dalam hal manajemen. Salah satu indikasinya adalah keanggotaan koperasi sudah sesuai aturan perkoperasian minimal 20 orang anggota .

Segi Partisipasi para anggota sudah bagus ada yang menabung adanya juga yang melakukan pembiayaan. Jika dilihat partisipasi kehadiran dalam rapat anggota maka kecenderungan lebih dari 50 % menghadiri. Koperasi Ijtihad relative baru karena masih 5 bulan berjalan sehingga belum dilakukan Rapat Anggota Tahunan, hanya saja pada penelitian ini peneliti mengajak anggota untuk melakukan rapat pengesahan AD-ART untuk koperasi yang akan didaftarkan ke notaries. Kehadiran pada rapat tersebut lebih dari 50%. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anggota bagus.

Segi pencatatan keuangan pengelola masih kurang teliti hal ini mengindikasikan bahwa pengelola seharusnya lebih teliti dengan membandingkan data di computer dan data secara manual sehingga tidak ada kesalahan dalam menginput data. Kesalahan tersebut akan berpengaruh terhadap hasil laporan keuangan. Laporan keuangan tidak menunjukkan nilai sebenarnya sehingga menyebabkan pemakai laporan menjadi salah dalam menilai. Salah satu yang paling penting penilaian kinerja pada koperasi akan salah misalkan data manual beban yang dikeluarkan senilai Rp 30.000,- tetapi dikomputer menunjukkan sebesar Rp 20.000,- . Selisih

tersebut sebesar Rp 10.000,- meskipun jumlah kas tidak ada masalah, hanya saja nilai tersebut menjadi salah dalam membaca laporan keuangan tersebut.

Segi Kepengurusan dan Pengawas koperasi Ijtihad telah bagus. Struktur organisasi telah memenuhi kaidah perkoperasian Operasional kegiatan koperasi dilakukan oleh seluruh pengurus untuk kegiatan pemasaran, tetapi untuk kegiatan pencatatan keuangan hanya dilakukan oleh bendahara.

Segi program kerja koperasi masih kurang dalam perencanaan. Perencanaan yang baik dibuat dalam jangka pendek satu tahun kedepan dan jangka waktu panjang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan di koperasi masih dibuat setiap bulan kedepan sehingga kurang sistematis. Pembuatan rencana kegiatan di koperasi Ijtihad telah dibuat dengan musyawarah antar pengurus saja yang kemudian masih belum disyahkan kepada para anggota. Kegiatan ini dilakukan karena masih relative baru. Untuk kedepan peneliti menghimbau perencanaan dilakukan pada saat RAB (rancangan anggaran belanja)

Segi rapat pengurus dengan pengawas sudah dilakukan hanya saja tidak terjadwal. Rapat antar Pengurus atau dengan pengawas koperasi sebaiknya dilakukan terencana selain rapat karena insidental.

Segi bidang Administrasi koperasi Ijtihad telah memenuhi standar buku administrasi perkoperasian. Kegiatan pencatatan keuangan yang terjadi di koperasi dilakukan dengan program dan pencatatan secara manual. Bendahara masih tetap mencatat secara manual dengan maksud untuk membantu dalam mengecek data di program.

Segi Pengendalian intern Koperasi Ijtihad telah melakukannya hanya bagian pemisahan tugas belum dilakukan antara yang menerima kas dan mengeluarkan kas (kasir) dengan petugas yang meyelenggarakan pembukuan . Hal itu dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap buku catatan manual yang kemudian dicocokkan dengan nilai kas yang ada di data *software* apakah sesuai atau tidak. Pengurus atau petugas akan mengkroscek letak perbedaan tersebut jika tidak sesuai. Pembatasan sisa kas belum dilakukan secara tertulis hanya berdasar inisiatif kasir dan bendahara, yaitu jika dana tersisa antara 1 juta sampai 3 juta, sehingga tidak boleh memberikan pembiayaan. Pemeriksaan mendadak belum dilakukan oleh pejabat berwenang di koperasi, padahal pemeriksaan ini penting untuk melihat apakah benar nilai yang dicatat dengan cek fisik berupa nilai kas tunai. Penyimpanan kas sebagian berada di teman yang amanah, dalam hal ini keuangan dibawa oleh sekretaris, karena yang paling dekat dengan

kantor KJKS. Proses penyimpanan selanjutnya akan disimpan di bank agar lebih aman. Pembayaran dengan *cheque* belum dilakukan karena KJKS Al Ijtihad masih relatif baru. Rekening koran dari bank dan rekonsiliasi secara berkala masih belum dilakukan karena masih relatif baru.

Pengendalian *intern* atas piutang sudah baik hanya saja untuk petugas khusus yang memberi dan menyetujui piutang yang dipisahkan dengan pencatatannya belum ada, karena seluruh pengurus difungsikan sebagai *marketing* dan juruh tagih, Pemisahan pemegang buku pembantu piutang dengan buku besar pembantu belum ada, penentuan piutang ragu-ragu yang harus disetujui lebih dahulu oleh pengurus belum pernah dilakukan, Pemberian pinjaman pada yang masih menunggu belum pernah dilakukan.

7. Analisis Pengembangan Keilmuan Dalam Jejaringan di Koperasi

Jejaringan yang dilakukan koperasi dengan melibatkan dinas terkait, Dinas Koperasi dan UMKM, pengenalan program (sosialisasi), terbentuknya FGD merupakan langkah yang bagus. Mengajak unsur semua elemen masyarakat merupakan modal social untuk menjadi dikenal dan mengajak masyarakat untuk ikut didalamnya. Secara teori Kerjasama tersebut diwarnai suatu pola interaksi yang imbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun atas dasar kepercayaan yang ditopang oleh nilai-nilai sosial yang positif dan mengakar kuat di masyarakat.

8. Analisis pengembangan keilmuan dalam meningkatkan aspek manajerial.

Praktek pasca pelatihan/kursus bagi pengelola KJKS Al Ijtihad, dan terumuskannya AD/ART dengan monitoring dan evaluasi. Rencana programnya adalah pendampingan dan monitoring serta evaluasi secara terus menerus sehingga setiap hasil atau temuan dalam aplikasi program dapat dijadikan *progress report* untuk menentukan program berikutnya. Hal itu merupakan cara untuk meningkatkan aspek manajerial dalam menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*, Yogyakarta: Radja Pustaka, 2007
- Ahmad Mahmudi, SH., *Kuliah Pengantar Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*
- Arif, *Desentralisasi Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Potensi dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Teraju, 2005
- Francis Fukuyama, dalam Jousairi Hasbullah, *Potensi dan Kearifan Lokal dalam Muatan Nilai-Nilai Lokal*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006
- Isbandi Rukminto Adi, *Kearifan lokal sebagai Modal Sosial*, Yogyakarta: Radja Pustaka, 2007
- LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, Modul Pelatihan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya : LPM IAIN Sunan Ampel, 2008
- Yuyun dalam Socharsono sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009